

ABSTRAK

Penguasaan rumah dinas tanpa hak sebagai Barang Milik Negara (BMN) merupakan permasalahan hukum yang mencerminkan disharmoni antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme sanksi administratif terhadap penyalahgunaan rumah dinas, mengkaji prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 54/Pdt.G/2018/PN Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan BMN telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk melakukan penertiban melalui mekanisme administratif yang berjenjang, mulai dari peringatan hingga pengosongan paksa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan administratif, tuntutan ganti rugi, hingga jalur peradilan sebagai upaya terakhir. Dalam putusan yang dikaji, hakim menyatakan bahwa perjanjian pengosongan rumah dinas sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, serta tidak terbukti adanya cacat kehendak. Penguasaan rumah dinas setelah berakhirnya hak dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Kesimpulannya, penguasaan rumah dinas tanpa hak tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan negara berwenang melakukan penertiban secara proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum administrasi dalam pengelolaan BMN guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata kunci : Barang Milik Negara (BMN), Rumah Dinas, Penguasaan Tanpa Hak, Sanksi Administratif

ABSTRACT

The unauthorized control of official residences as State Property (BMN) is a legal issue that reflects the disharmony between normative provisions and field practices, and has the potential to result in legal permits and state losses. This study aims to analyze the legal regulations and administrative sanction mechanisms for the protection of official residences, examine the settlement procedures based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, and examine the judge's legal considerations in Decision No. 54/Pdt.G/2018/PN Tasikmalaya. The research method used is normative juridical with a regulatory approach, conceptualization, and cases, as well as qualitative data analysis. The results of the study indicate that the BMN regulations have provided a strong legal basis for the state to carry out order through tiered administrative mechanisms, ranging from warnings to forced evictions. Settlement is carried out through administrative stages, claims for compensation, and the judicial route as a last resort. In the conclusion reviewed, the judge stated that the agreement to vacate the official residence was legally valid because it met the requirements of Article 1320 of the Civil Code, and there was no evidence of any intended defects. Possession of the official residence after the termination of the right is considered an unlawful act. In conclusion, the

occupation of the official residence without rights has no valid legal basis, and the state has the authority to carry out proportional enforcement. This study emphasizes the importance of harmonization between civil law and administrative law in the management of BMN in order to ensure legal certainty and justice.

Keywords: State Property (BMN), Official Residence, Unauthorized Possession, Administrative Sanctions.